



Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Bebby Masithoh Batubara*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan komunikasi BPD dan masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota BPD sebanyak 5 orang dan seluruh masyarakat desa Pergajahan Hulu sebanyak 65 kk. Sampel dalam penelitian ini merupakan sampel total yaitu 65kk. Pengambilan sampel dilakukan secara keseluruhan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hubungan antara komunikasi Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Masyarakat terhadap Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan setelah diketahui bahwa koefisien korelasi lebih besar yaitu 0,57 dari r tabel yaitu 0,297 maka terdapat korelasi positif yang signifikan antara Komunikasi Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan. Dilihat dari tabel Interpretasi nilai r maka koefisien korelasi 0,57 masuk dalam interpretasi cukup, yaitu antara 0,40 sampai dengan 0,60 maka diperoleh korelasi cukup yang berarti diantara kedua variabel tersebut terdapat korelasi yang positif.

Kata Kunci: Hubungan Komunikasi; Badan Perwakilan Desa; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan

Abstract

This research is to discuss (1) how the existence (presence) of Section Peace and Order in supporting local government programs in District Lubukpakam Deli Serdang, (2) What efforts are made Sexy Peace and Order in carrying out their duties and functions, (3) the obstacles and constraints encountered any Section of Peace and Order as well as the ways to overcome them. The method used is a qualitative description as a method of data analysis which took place at the Head Office study Lubukpakam Peace and Order Section. Sources of data in this study is the Peace and Order Section Head Lubukpakam. Data were collected by interviews and documentation by using the steps of editing, classification and presentation of data. The results of this study showed that the duties and functions of Peace and Order Section plays an important role in helping the main tasks of Head and Regional Head (Bupati) in establishing and running a local government program in the field of peace and public order in the district level. One way is to conduct a routine patrol of morning, afternoon, into the evening alternately. Efforts were made and the obstacles encountered and how to overcome divided into several areas: the institutional field, the field of networking, counseling field, field operations, field of action, and ends with anticipation field routine.

Keywords: Existence; Peace and Order Section.

How to Cite: Batubara, B.M. (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 65-76.

*Corresponding author:

E-mail: bebymasithohbatubara@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan aparat pemerintah yang bertugas di pedesaan yang mempunyai wewenang sebagai penasehati dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan kepentingan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Di samping itu pemerintahan desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat, baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dilandasi oleh azas usaha bersama dan kekeluargaan.

Dalam pemerintahan desa menurut UU No. 32 Tahun 1999 yang disebut dengan "Pemerintahan desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan badan Perwakilan Desa (BPD)". Sementara itu, berdasarkan PERPU No. 76 Tahun 2001 disebutkan bahwa: "Di Desa dibentuk pemerintahan desa yang langsung berhubungan dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan "Pemerintahan yang peka" terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

Demi perubahan yang lebih baik, suatu daerah harus memiliki masyarakat yang selalu ikut serta dalam pembangunan yang ada di daerahnya. Karena diperlukannya partisipasi dari masyarakat tersebut agar tercapai tujuan yang diharapkan. Dan demi kelangsungan kegiatan tersebut, perlu peran pemerintah yaitu BPD. BPD diharapkan menjadi arena baru demokrasi desa, antara lain menjadi tempat pembuatan kebijakan publik yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat, serta mampu melakukan kontrol terhadap sepele terjal pemerintah desa.

Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintahan desa. Sedangkan dari segi pengembangan, peran serta masyarakat digerakkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pembangunan desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Nasional. Hal ini berarti

bahwa landasan idiil pembangunan desa adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan desa merupakan pimpinan yang secara formal bertanggung jawab terhadap penumbuhan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Karena pemerintahan desa yang lebih mengetahui bagaimana keadaan caranya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berguna dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan adalah: Keterpaduan, menyeluruh, berkelanjutan, dan dinamis serta terkoordinasikan. Selain daripada itu diperhatikan pula azas keseimbangan antara peranan dan kewajiban Pemerintah dan kemampuan berpartisipasi dari masyarakat pedesaan dalam bentuk prakarsa dan swadaya masyarakat.

Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Kemudian sejak tahun 1980, secara berturut-turut telah dikeluarkan berbagai peraturan, keputusan dan instruksi Menteri Dalam Negeri sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintahan desa harus saling bekerja sama. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa dan BPD, sebagai mitra Kepala Desa yang mempunyai kedudukan sejajar, BPD sangat berperan dalam mengayomi desa dan masyarakat desa. Namun untuk melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan bukanlah pekerjaan yang mudah dan cepat. Tetapi membutuhkan usaha yang cukup berat dan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang multi arah. Proses komunikasi pada hakekatnya merupakan proses penyampaian pikiran atau perasaan. Pikiran itu bisa berupa gagasan, informasi, dan opini sedangkan perasaan merupakan keyakinan, kepastian, keragu-ruguan, kekhawatiran, kemarahan, dan keberanian yang timbul dari lubuk hati manusia.

Demikian juga halnya bagi masyarakat dimana untuk menyampaikan aspirasi, pendapat ide, dan keluhan-keluhannya sehingga posisi yang paling dekat adalah pemerintahan desa/BPD. Oleh karena itu perlu adanya komunikasi yang baik antara BPD dengan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. BPD dan individu-individu yang ada di dalamnya, berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat dengan BPD berkomunikasi, kapan dan dimana saja, dan tidak perlu ada suasana formal.

PEMBAHASAN

Dalam suatu organisasi atau kelompok komunikasi merupakan alat penting untuk menciptakan suatu kerja sama. Penyampaian informasi yang akurat dan adanya pemahaman informasi dari satu unit ke unit lain merupakan kegiatan yang vital terutama dalam perumusan dan penerapan tujuan-tujuan dari organisasi.

Dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, komunikasi adalah bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Manusia sejak dilahirkan sudah berkomunikasi dengan lingkungannya. Gerak dan tangis yang pertama pada saat ia dilahirkan adalah suatu tanda komunikasi.

Berkomunikasi pada hakekatnya merupakan sebuah transaksi manusia, dan komunikasi itu merupakan suatu proses dan bukan tujuan. Komunikasi memungkinkan proses manajemen dan bertindak sebagai penghubung dalam pelaksanaannya.

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu dengan "*communicare*" yang berarti sama. Dalam bahasa Inggris disebut *Communication* yang berasal dari kata *Comunis* yang artinya sama pengertiannya. Untuk lebih jelasnya berikut ini di kemukakan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian komunikasi yaitu sebagai berikut.

Depari dalam Widjaja (2008: 1-2), memberikan pengertian komunikasi:

"Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti, dilakukan oleh penyampaian pesan (*source, communicator, sender*) ditujukan kepada penerima pesan (*receiver, communicator, atau audience*) dengan maksud mencapai kebersamaan (*commonness*).

Woworuntu mendefinisikan: "Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pengertian dari orang yang satu pada yang lain".

Stoner dalam Widjaja (2008: 8), menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan.

Menurut Schemerhorn dkk dalam Widjaja (2008: 8) menyatakan bahwa komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka.

Widjaja (2008: 8) mengatakan: "Komunikasi adalah penyampaian informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil baik apabila sekiranya timbul saling pengertian yaitu jika kedua belah pihak si pengirim dan si penerima informasinya memahaminya ". Pendapat lain di kemukakan oleh Handoko yang mengatakan bahwa "komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang pada orang lain".

Tim terkenal yang terdiri dari Shanon dan Weaver (1949) juga menerima unsur penyampaian ini, akan tetapi menambah unsur interen lainnya. " bahwa komunikasi itu adalah mencakup semua unsur melalui pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lainnya". Defenisi semacam ini menempatkan komunikasi sebagai unsur kontrol sosial dimana seseorang mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi perilaku, keyakinan, sikap, dan seterusnya dari orang lain dalam suatu suasana sosial (Rahmat, 1986). Inti dari komunikasi adalah pertukaran informasi

antar dua pihak yang saling memberi dan saling menerima.

Jadi kesimpulannya komunikasi adalah, proses penyampaian informasi dalam bentuk gagasan melalui lambang-lambang yang mengandung arti tertentu dari seseorang kepada orang lain sehingga terjadi hubungan timbal balik. Dengan kata lain komunikasi merupakan suatu proses yang mempunyai tahap-tahap pelaksanaan. Demikian juga komunikasi antar Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Masyarakat sangatlah penting, dimana dengan komunikasilah masyarakat dapat menerima informasi-informasi yang terkait dengan pembangunan desa tersebut.

Komunikasi hanya bisa terjadi apabila didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, efek, umpan balik dan lingkungan. Seperti halnya defenisi komunikasi, maka klasifikasi tipe atau bentuk komunikasi dikalangan para pakar juga berbeda satu sama lainnya. Tapi dari penggabungan tipe menurut para pakar diperoleh empat tipe komunikasi yaitu: Komunikasi dengan diri sendiri (*Intrapersonal Communication*); Komunikasi antarpribadi (*Interpersonal Communication*); Komunikasi publik (*Public Communication*); Komunikasi massa (*Mass Communication*)

Dengan adanya komunikasi banyak hal yang dapat kita peroleh. Oleh karena itu komunikasi memiliki fungsi yang sangat berarti bagi kehidupan. Fungsi dari komunikasi dapat diperjelas berdasarkan tipe komunikasi yaitu:

Komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreatifitas dan imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berfikir sebelum mengambil keputusan.

Komunikasi antar pribadi berfungsi untuk berusaha meningkatkan hubungan insani (*human relations*), menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi, mengurangi ketidak pastian sesuatu, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain.

Komunikasi publik berfungsi untuk menumbuhkan semangat kebersamaan (solidaritas), mempengaruhi orang lain, memberi informasi, mendidik dan menghibur.

Komunikasi massa berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, diperlukan suatu sistem komunikasi agar terjalin komunikasi efektif dan memiliki makna yang mampu mengarahkan pencapaian tujuan pembangunan. Hal itu perlu sekali dilakukan karena proses pembangunan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Komunikasi pembangunan ini harus mengedepankan sikap aspiratif, konsultatif dan relationship. Karena pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal tanpa adanya hubungan sinergis antara pelaku dan obyek pembangunan. Apalagi proses pembangunan ke depan cenderung akan semakin mengurangi peran pemerintah, seiring semakin besarnya peran masyarakat.

Konsep komunikasi pembangunan sangat membuka peluang untuk mendorong komunikasi intensif melalui dialog dengan kelompok-kelompok strategis dalam rangka membangun kemitraan untuk mempengaruhi kebijakan publik sebelum diputuskan. Berbagai kelompok yang perlu dilibatkan dalam kemitraan antara lain Perguruan Tinggi, LSM, pers dan berbagai elemen pendukung pembangunan lainnya. Agar komunikasi pembangunan berjalan dengan efektif, maka diperlukan suatu pusat komunikasi yang menjadi rujukan dari pelaku-pelaku pembangunan maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memperoleh informasi dan koordinasi pembangunan secara terpadu.

Pengertian Komunikasi Pembangunan secara luas yaitu peran dan fungsi komunikasi (sebagai aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik) di

antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama masyarakat dan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap pembangunan.

Pengertian Komunikasi Pembangunan secara khusus: segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian pesan /gagasan dan keterampilan-ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat memahami, menerima dan ikut melaksanakan gagasan tersebut.

Tiga aspek komunikasi dan pembangunan yang saling berkaitan: Pendekatan yang berfokus pada pembangunan suatu bangsa, dan bagaimana media massa dapat menyumbang dalam upaya tersebut. Di sini politik dan fungsi-fungsi media massa dalam pengertian yang umum merupakan objek studi, sekaligus masalah yang menyangkut struktur organisasional dan kepemilikan, serta kontrol terhadap media. Untuk studi ini digunakan istilah kebijakan komunikasi dan merupakan pendekatan yang paling luas dan bersifat umum; Pendekatan yang lebih spesifik memahami peranan media massa dalam pembangunan nasional. Menurut pendekatan ini, media massa sebagai pendidik atau guru, dan idenya adalah bagaimana media massa dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan kepada masyarakat berbagai keterampilan, dan dalam kondisi tertentu memengaruhi sikap mental dan perilaku mereka. Persoalan utama pendekatan ini, bagaimana media dapat dipakai secara efisien untuk mengajarkan pengetahuan tertentu bagi masyarakat suatu bangsa; Pendekatan yang berorientasi pada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Pendekatan ini berkonsentrasi pada bagaimana aktivitas komunikasi dapat dipakai dalam menyebarkan ide-ide, produk dan cara-cara baru di suatu desa atau wilayah.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu strategi yang menekankan pada perlunya sosialisasi pembangunan kepada para pelaku pembangunan berupa penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah untuk mencapai tujuan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

Tujuan Komunikasi Pembangunan adalah Memberikan informasi; Persuasif (menggugah perasaan); Mengubah perilaku; Menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat; Meningkatkan pendapatan;

Metode Pendekatan Komunikasi Pembangunan: a. Pendekatan Sasaran: Pendekatan massa, Memberikan pemahaman awal kepada masyarakat dengan media massa; Dilakukan oleh pengambil kebijakan; Keuntungan: program cepat tersebar luas. Pendekatan Kelompok: Menginformasikan program kepada kelompok-kelompok masyarakat contoh. Pelatihan, Workshop; Keuntungan: program dapat dipantau secara baik. Pendekatan Individu: Menginformasikan program dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga; Keuntungan: warga merasa dihargai, komunikasi dari hati ke hati, petugas dapat menggali semua permasalahan warga.

Dalam arti umum desa adalah permukiman desa yang letaknya diluar kota aktivitas ekonomi produksinya bercorak agraris. Dalam arti administratif, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (berdasarkan UU No. 32 pasal 1 Tahun 2004).

Menurut Bintarto (1984), desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Desa tidak sama luasnya disetiap wilayah, Setiawan (2003) membagi desa berdasarkan luas dan kepadatannya yaitu: Desa terkecil memiliki luas $\leq 2 \text{ km}^2$ dengan kepadatan ≤ 100 jiwa/ km^2 ; Desa kecil dengan luas 2-4 km^2 dengan kepadatan 100-500 jiwa/ km^2 ; Desa sedang dengan luas 4-6 km^2 dengan kepadatan 500-1500 jiwa/ km^2 ; Desa besar dengan luas 6-8 km^2 dengan kepadatan 1500-3000 jiwa/ km^2 ; Desa terbesar dengan luas 8-10 km^2 dengan kepadatan 3000-4500 jiwa/ km^2

Defenisi lain menurut Daldjoeni (1987) desa adalah suatu tempat atau daerah dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dimana mereka dapat menggunakan lingkungan setempat untuk kehidupan mereka. Dalam defenisi tersebut tersirat adanya tiga unsur yaitu penduduk, tanah dan bangunan, karena masing-masing unsur itu lambat atau cepat mengalami perubahan maka desa sebagai pola permukiman bersifat dinamis.

Selanjutnya menurut Yulianti (2003) pengelompokan desa dapat dilakukan dengan penghitungan baik secara kualitatif maupun kuantitatif atas semua aspek kehidupan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Indikator fisik bersifat relatif tetap yakni daya dukung alam menyangkut potensi geografis, iklim, kesuburan tanah, potensi hutan, air, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Aspek non fisik merupakan aspek yang relatif berkembang dari waktu ke waktu. Aspek ini terdiri dari mata pencaharian yang meliputi jumlah, ragam dan jenis usahanya, tingkat pendidikan, juga keterampilan masyarakat. Selain itu perkembangan kebudayaan berupa keterkaitan warga desa dengan adat istiadat juga merupakan indikator non fisik yang penting. Selain itu tingkat ekonomi serta sarana dan prasarana, dan

tingkat kelembagaan merupakan indikator non fisik dalam pengklasifikasian desa.

Dari klasifikasi tersebut maka desa dapat digolongkan dalam tiga tingkatan yaitu: pertama adalah Desa Swadaya, yaitu desa ini merupakan desa yang paling terbelakang dengan budaya kehidupan tradisional, sangat terikat dengan adat istiadat atau sering disebut sebagai desa tradisional. Desa ini biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan yang rendah, sarana yang minim serta sangat tergantung pada alam dan juga tergantung pada sektor ekonomi primer. Secara umum ciri-ciri desa swadaya adalah sebagai berikut: Lebih dari 50% penduduk bermatapencaharian di sektor primer (berburu, menangkap ikan, dan bercocok tanam secara tradisional); Produksi sangat rendah dibawah 50 juta rupiah/tahun; Adat istiadat masih mengikat kuat; Pendidikan dan keterampilan rendah, kurang dari 30% yang lulus SD; Prasarana masih sangat kurang; Kelembagaan formal maupun informal kurang berfungsi dengan baik; Swadaya masyarakat masih sangat rendah sehingga kerap kali pembangunan desa selalu menunggu dari atas.

Kedua adalah Desa Swakarya, Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1972 bahwa desa swakarya telah mengalami perkembangan agak maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa ini telah memiliki landasan untuk berkembang lebih baik serta penduduknya relatif lebih kosmopolit. Secara umum ciri-ciri desa swakarya adalah sebagai berikut: Mata pencaharian penduduk mulai berkembang dari sektor primer ke industri. Penduduk desa mulai menerapkan teknologi pada usaha taninya, dan perkembangan kerajinan serta sektor sekunder mulai berkembang; Produksi desa masih pada tingkat sedang, yaitu 50-100 juta rupiah/tahun; Adat istiadat dalam keadaan transisi dimana dominasi adat mulai luntur; Kelembagaan formal maupun informal mulai berkembang ada 4-6 lembaga yang hidup; Keterampilan masyarakat dan pendidikannya pada

tingkat sedang 30-60% telah lulus SD bahkan ada yang lulus sekolah lanjutan; Fasilitas dan prasarana mulai ada meski tidak lengkap, paling tidak ada 4-6 sarana umum yang tersedia di masyarakat; Swadaya dan gotong royong dalam pembangunan desa mulai tampak walaupun tidak sepenuhnya.

Ketiga adalah Desa Swasembada, desa ini merupakan desa yang memiliki kemandirian lebih dalam segala hal terkait dengan aspek sosial dan ekonominya. Desa ini mulai berkembang dan maju dengan petani yang tidak terkait pada adat istiadat lagi. Selain itu sarana dan prasarana telah lengkap meski tidak selengkap kota serta perekonomian telah mengarah pada industri dan jasa. Perdagangan dan sektor sekunder telah berkembang sehingga secara umum desa swasembada dapat dicirikan sebagai berikut: Matapencaharian penduduk sebahagian besar disektor jasa dan perdagangan, atau lebih dari 55% penduduk bekerja disektor tersier; Produk telah tinggi, penghasilan seluruh usaha yang ada di desa diatas 100 juta rupiah/tahun; Adat istiadat tidak mengikat lagi meskipun sebahagian masyarakat masih menggunakannya; Kelembagaan telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan telah ada 7-9 lembaga yang hidup; Pendidikan dan keterampilan telah tinggi 60% telah lulus SD, sekolah lanjutan bahkan telah lulus perguruan tinggi; Prasarana dan sarana baik; Penduduk mempunyai inisiatif sendiri melalui swadaya dan gotong royong dalam membangun desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga dimaksud merupakan mitra Pemerintahan Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal, berdasarkan hal asal usul desa yang bersangkutan Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat diperlukan aparatur perangkat desa yang berkualitas.

Berkaitan dengan otonomi desa, penempatan Badan Perwakilan Desa (BPD) pada posisi yang strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat desa setempat. Lembaga perwakilan rakyat (BPD) adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat perdesaan yang berfungsi sebagai lembaga legislatif, mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai mitra kerja kepala desa dalam penyelenggara pemerintahan desa, BPD membantu masyarakat desa dalam pengambilan keputusan-keputusan demi tercapai tujuan bersama yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, kepala desa mempunyai mitra sejajar dalam menjalankan pemerintahan desa yang disebut BPD.

Berdasarkan penjelasan diatas Badan Perwakilan Desa merupakan Pemerintahan Desa yang berkedudukan paling dekat dengan masyarakat desa, karena melalui BPD masyarakat desa dapat mengeluarkan segala aspirasi dan keluh kesah mereka. Kemudian BPD akan menyalurkan aspirasi dan keluh kesah masyarakat desa tersebut kepada kepala desa/ instansi yang berwenang.

Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: Jumlah penduduk desa sampai dengan 1.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang; Jumlah penduduk desa antara 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; Jumlah penduduk desa

antara 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang; Jumlah penduduk desa antara 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang; Jumlah penduduk desa lebih dari 3.000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Hubungan antara Pemerintah Desa dengan BPD sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 adalah: Pasal 95 ayat 3, Badan Perwakilan Desa mempunyai tugas untuk menetapkan Kepala Desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa; Pasal 102, Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkannya kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; Pasal 104, Fungsi dari Badan Perwakilan Desa sebagaimana diatur dalam adalah: Mengayomi adat istiadat (BPD berfungsi menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan); Membuat peraturan desa (BPD bersama-sama dengan Pemerintah desa berfungsi merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa); Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (BPD menyalurkan dan menyampaikan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pihak yang berwenang); Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (BPD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa)

Hubungan antara Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa. Jika salah satu dari Badan Perwakilan Desa atau Kepala Desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara

hukum. Peraturan desa yang ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan Kepala Desa juga termasuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya (ayat 3 pasal 107 UU No. 22 tahun 1999).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat loka denga pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Bahkan pula mereka akan mempunyai “pengetahuan lokal” untuk mengatasi masalah yang dihadapinya tersebut.

Midgley (1986) menyatakan bahwa partisipasi bukan hanya sekedar salah satu tujuan dari pembangunan sosial tetapi merupakan bagian yang integral dalam proses pembangunan sosial. Partisipasi masyarakat berarti eksistensi manusia seutuhnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin keilmuan. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atas rangsangan-rangsangan yang diberikan; yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat

(*rewards*) yang dapat diharapkan (Berlo, 1961).

Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Asngari (2001: 29) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dalam menggalang peran serta semua pihak itu diperlukan : (1) terciptanya suasana yang bebas atau demokratis, dan (2) terbinanya kebersamaan.

Slamet (2003: 8) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam imbangan yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga pembangunan desa perlu menggerakkan masyarakat desa untuk berpartisipasi baik di dalam perencanaan, pemanfaatan hasil serta penilaian hasil-hasilnya (Pasaribu, 1986: 167).

Sesungguhnya partisipasi masyarakat erat hubungannya dengan kesuksesan pembangunan. Ada beberapa alasan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan: Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut; Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat; Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah

yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; Partisipasi dilaksanakan lebih baik dengan dinilai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki; Partisipasi memperluas zona (kawasan) penerimaan proyek pembangunan; Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat; Partisipasi menopang pembangunan; Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia; Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah; Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri (Moeljarto, 1987: 48).

Partisipasi ini menyangkut perasaan ataupun kejiwaan bahkan kesadaran seseorang terhadap menanggapi sesuatu, jadi ada perlunya suatu komunikasi ataupun informasi bahkan berupa motivasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat setempat, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menanggapi proyek pembangunan.

Zulkarimen (2002: 116-117) mengatakan: Kalau masyarakat tidak tahu yang sedang dibangun adalah untuk keperluan mereka sendiri, bisa-bisa mereka tidak peduli. Malah ada kemungkinan timbul salah sangka, bahwa yang sedang dibangun adalah milik seseorang dan bukan untuk keperluan bersama.

Partipasi dapat dilakukan dalam beberapa hal menurut Ndraha (1986: 26-27) dalam metode penelitian pembangunan desa yaitu: Partisipasi dalam menerima dan memberi informasi; Partisipasi dalam memberi tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang bermaksud menolak, maupun yang bermaksud mengejakan atau menerima dengan syarat; Partisipasi dalam perencanaan pembangunan; Partisipasi

dalam pelaksanaan operasional pembangunan; Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan; Partisipasi dalam menilai pembangunan.

Conyers (1991) menyebutkan tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat, tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Alasan kedua adalah bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Alasan ketiga yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Hal ini selaras dengan konsep *man-centered development* yaitu pembangunan yang diarahkan demi perbaikan nasib manusia.

Sebelum ditelaah pembangunan desa, maka ada lebih baiknya terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dasar pembangunan pada umumnya. Istilah pembangunan secara kasar merupakan sinonim dari kemajuan. Dalam konteks ini, pembangunan berarti transformasi sosial dalam mengatur distribusi potensi sosial kepada semua orang seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain dari peluang kehidupan manusia.

Kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang di maksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai

oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi.

Untuk lebih jelasnya apa itu pembangunan, maka penulis mengutip pendapat (Bintarto dkk 1988:23): “Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan lebih baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu”.

Hakekat pembanguna Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara mengejar kemajuan lahiriah dengan kemajuan batiniah. Kemudian pembangunan di laksanakan diseluruh tanah air Indonesia, bukan hanya untuk suatu golongan atau sebageian masyarakat namun harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Beratha memberikan batasan dari pengertian pembangunan, yakni: Suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Potensi alam harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya seperti tanah, hutan, sumber air, mineral dan sebagainya. Potensi manusia berupa penduduk yang besar jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam tersebut diatas semaksimal mungkin. Jadi pembangunan nasional suatu bangsa sebenarnya adalah merupakan suatu usaha raksasa dari bangsa itu, untuk mencapai kesejahteraan lahir batin yang bukan saja sebenarnya menjadi idaman-idaman dari warga Negara dan bangsa yang bersangkutan melainkan pula merupakan cita-cita setiap umat manusia.

Hal senada dengan pendapat diatas, Notoatmojo (1998: 5) mengemukakan bahwa: Dalam melaksanakan pembangunan, dua asset pokok yang harus dimiliki, yakni sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia lebih penting dari pada sumberdaya alam, tanpa adanya kemampuan sumberdaya manusia mengelolanya maka akan sia-sia.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan yang continue atau dengan istilah lain adalah melalui tahapan-tahapan. Karena apabila mengabaikan proses pentahapan ini sudah terbukti akan dijumpai banyak kesulitan-kesulitan, bahkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Disamping itu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunan seperti antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, maka kegiatan awal dimulai dengan pengembangan di bidang ekonomi tanpa melupakan usaha dan kegiatan pembangunan di bidang lain. Karena dengan kemajuan di bidang ekonomi akan bisa merupakan landasan materil yang diperlukan untuk mendukung pengembangan dibidang lain.

Setelah dikemukakan beberapa batasan pengertian dasar tentang pembangunan, kemudian dibahas lebih khusus mengenai pembangunan desa. Ditinjau dari segi istilah sebenarnya pembangunan desa pengertiannya identik dengan pembangunan masyarakat desa. Bahwa semenjak lahirnya istilah pembangunan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya terdapat di Negara kita saja, akan tetapi boleh dikatakan mempunyai kedudukan internasional dan mempunyai latar belakang historis, sosial,ekonomi, kultural, dan spiritual.

Demikianlah seperti apa yang ditegaskan oleh Soetomo dalam Beratha (1999: 710), sebagai berikut: Istilah pembangunan masyarakat desa mula-mula hanya pembangunan masyarakat saja, sesuai dengan istilah asingnya “ Communit

Development”. Rasa-rasanya yang asli Indonesia hanya “D”nya (Desa) saja dari P.M.D. Jadi Village Community Development, sebab diistilah-istilah dilain negara pada umumnya hanya CD atau “Rural CD” (misalnya di Burma, Ceylon), Village Agricultural and Industrial Development (V.AID seperti di Pakistan) atau ‘Rural Recontruction’ seperti dipakai di India.

Kemudian untuk di Indonesia seperti diketahui pada akhir-akhir ini terkenal istilah pembangunan desa, dimana istilah desa sudah tercakup pengertian masyarakatnya. Tetapi yang pokok bahwa istilah-istilah pembangunan masyarakat desa, modernisasi desa, pembangunan desa, sebenarnya adalah identik/ pengertiannya sama saja.

Lebih lanjut Beratha (1992:72), mengemukakan bahwa: Menurut catatan resmi dalam Pola Gerak Operasional Pembangunan Desa (SK. Mendagri No. 42 Tahun 1969) masyarakat bahwa pembangunan desa adalah usaha pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah yang terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus menerus sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyentuh.

Tujuan principal dan fundamental dari Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia adalah bahwa dalam jangka pendek bertujuan untuk menaikkan taraf hidup rakyat (khususnya rakyat di desa) dan tujuan jangka panjangnya ialah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

SIMPULAN

Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi, ide, emosi, keterampilan melalui simbol, kata, gambar, angka dan lain-lain. Sedangkan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan fikiran dan perasaan terhadap sesuatu rangsangan, kesediaan untuk memberikan sesuatu hal. Sebagai pelaku pembangunan baik BPD maupun individu/ masyarakat

melakukan pengambilan keputusan secara bertahap dan berencana sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional. Melalui kerjasama dimana proses kerjasama tersebut dibutuhkan Hubungan Komunikasi yang baik antara BPD dan Masyarakat. Dengan begitu betapa pentingnya Komunikasi antara BPD dan Masyarakat dalam menunjang keberhasilan Pembangunan Desa. Oleh karena itu pembangunan akan berhasil secara maksimal apabila seluruh anggota BPD dan Masyarakat turut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Perlunya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana komunikasi BPD dan masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beratha, I.N. 1982/1992. Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Cangara, H. 2004. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Husin, S. 2003. Sistem Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah: USU
- Notoadmojo, S. 1988. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta
- Onong, U.E. 1986. Kepemimpinan dan Komunikasi, Bandung
- Pasaribu, I.L. 1986. Sosiologi Pembangunan, Bandung: Tarsito
- Sembiring, M. 2003. Sosiologi Pedesaan. Medan: UNIMED
- Sudjana. 1986. Metode Statistik. Bandung: Tarsito
- Sosrodiharjo, S. 1992. Perubahan Struktur Masyarakat di Jawa, Yogyakarta: Kaya
- Widjaja, A.W. 1986. Komunikasi, Jakarta: PT. Bina Aksara
- Peraturan Pemerintah No 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah